

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian Akuntansi

Akuntansi merupakan suatu sistem informasi yang menghasilkan suatu laporan yang berguna untuk pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan di dalam suatu perusahaan kegiatan ekonomi yang berjalan di perusahaan serta kondisi perusahaan tersebut.

Menurut Mamduh M. Hanafi dan Abdul Halim (2009:27), definisi akuntansi adalah: “Akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pengkomunikasian informasi ekonomi yang bisa dipakai untuk penilaian (*judgement*) dan pengambilan keputusan oleh pemakai informasi tersebut”.

Accounting Principle Board (APB) Statement No. 4 dalam Sofyan Syafri Harahap (2013:59), mendefinisikan akuntansi sebagai berikut:

“Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi yang dilakukan dalam memilih si antara beberapa alternatif pilihan”.

Menurut Kieso et al yang diterjemahkan oleh Emil Salim (2008:4) akuntansi adalah suatu sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan peristiwa-peristiwa ekonomi dan suatu organisasi kepada para pengguna yang berkepentingan.

Menurut Mulyadi (2009:2) akuntansi adalah proses pencatatan, penggolongan, pemeriksaan dan penyajian dengan cara-cara tertentu, transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan atau organisasi lain serta penafsiran terhadap hasilnya.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut maka dapat dikatakan bahwa akuntansi merupakan proses mengidentifikasi, mengukur, dan menyampaikan informasi atau kejadian ekonomi, dengan maksud untuk mendapatkan penilaian dan membantu para pengguna informasi guna pengambilan keputusan.

2.1.2 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan media yang dapat dipakai untuk meneliti kondisi kesehatan perusahaan terdiri dari neraca, perhitungan laba rugi, ikhtisar laba yang ditahan, dan laporan posisi keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi. Untuk meningkatkan kualitas dari laporan keuangan dan memenuhi kebutuhan para pengguna, laporan keuangan harus mengacu pada SAK.

Pengertian laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 2012 No. 1 paragraf 20, menyatakan bahwa: “Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas”.

Disamping itu Sofyan Syafri Harahap (2013:105), berpendapat bahwa:

“Laporan keuangan merupakan media yang paling penting untuk menilai prestasi dan kondisi ekonomis suatu perusahaan. Laporan keuangan dapat menggambarkan posisi keuangan perusahaan, hasil suatu perusahaan dalam suatu periode, dan arus data (kas) perusahaan dalam periode tertentu”.

Adapun menurut Kieso, Weygandt dan Warfield dalam Emil Salim (2007:2), pengertian laporan keuangan adalah: “Laporan keuangan merupakan sarana pengkomunikasian informasi keuangan utama kepada pihak-pihak diluar perusahaan. Laporan ini menampilkan sejarah perusahaan yang dikuantifikasi dalam nilai moneter”.

Pengertian di atas tersebut sejalan dengan pengertian laporan keuangan menurut Mamduh M. Hanafi dan Abdul Halim (2009:49), yang menyatakan laporan keuangan perusahaan merupakan salah satu sumber informasi yang penting disamping informasi lain seperti informasi industri, kondisi perekonomian, pangsa pasar perusahaan, kualitas manajemen dan lainnya. Ada tiga macam laporan keuangan yang pokok dihasilkan yaitu neraca, laporan rugi laba, dan laporan aliran kas. Disamping ketiga laporan pokok tersebut, dihasilkan juga laporan pendukung seperti laporan laba ditahan, perubahan modal sendiri, dan diskusi-diskusi oleh pihak manajemen.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dikatakan bahwa laporan keuangan adalah hasil dari proses pencatatan akuntansi yang ringkas berupa data keuangan dan aktivitas dari suatu perusahaan yang bertujuan untuk memberi gambaran mengenai kondisi keuangan, hasil usaha, serta kinerja perusahaan pada saat tertentu.

2.1.3 Good Corporate Governance

2.1.3.1 Pengertian Good Corporate Governance

Menurut Sukrisno Agoes (2011:101), istilah *good corporate governance* (GCG) dewasa ini sudah sangat populer, namun sampai saat ini belum ada definisi

buku yang dapat disepakati oleh semua pihak. Istilah “*corporate governance*” pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Committee, Inggris di tahun 1992 yang menggunakan istilah tersebut dalam laporannya yang kemudian dikenal sebagai Cadbury Report. Istilah ini sekarang menjadi sangat populer dan telah diberi banyak definisi oleh berbagai pihak.

Sukrisno Agoes (2011:101), mendefinisikan tata kelola perusahaan yang baik atau *good corporate governance* sebagai:

“Suatu sistem yang mengatur hubungan peran dewan komisaris, peran direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan yang baik juga disebut suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya dan penilaian kinerjanya”.

Organization for Economic Cooperation and Development- OECD dalam Sukrisno Agoes (2011:102), mendefinisikan GCG sebagai:

“Suatu struktur yang terdiri atas para pemegang saham, direktur, manajer, seperangkat tujuan yang ingin dicapai perusahaan, dan alat-alat yang akan digunakan dalam mencapai tujuan dan memantau kinerja. Namun harus disadari bahwa betapa pun baiknya suatu sistem dan perangkat hukum yang ada, pada akhirnya yang menjadi penentu utama adalah kualitas dan tingkat kesadaran moral dan spiritual dari para aktor atau pelaku bisnis itu sendiri”.

Menurut Moh. Wahyudin (2008:36), menjelaskan *good corporate governance* (GCG) pada dasarnya merupakan suatu sistem (*input, proses, output*) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan *good corporate governance* (GCG) dimasukkan untuk mengatur hubungan-hubungan ini dan mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan signifikan dalam strategi perusahaan dan

untuk memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera.

Dari berbagai pengertian diatas maka dapat dikatakan bahwa *good corporate governance* merupakan rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan aturan, dan institusi yang mempengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengendalian suatu perusahaan atau korporasi. Pengendalian bertujuan untuk membuat sesuatu terjadi dengan apa yang telah direncanakan. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar, akurat, dan tepat, dan kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, transparan, terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder*.

2.1.3.2 Manfaat *Good Corporate Governance*

Manfaat *good corporate governance* menurut Tjager dkk. (2003) dalam Sukrisno Agoes (2011:106), mengatakan bahwa paling tidak ada lima alasan mengapa penerapan GCG itu bermanfaat yaitu:

1. Berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh McKinsey & Company menunjukkan bahwa para investor institusional lebih menaruh kepercayaan terhadap perusahaan-perusahaan di Asia yang telah menerapkan GCG.
2. Berdasarkan berbagai analisis, ternyata ada indikasi keterkaitan antara terjadinya krisis finansial dan krisis berkepanjangan di Asia dengan lemahnya tata kelola perusahaan.
3. Internasionalisasi pasar termasuk liberalisasi pasar finansial dan pasar modal menuntut perusahaan untuk menerapkan GCG.
4. Walaupun GCG bukan obat mujarab untuk keluar dari krisis, sistem ini dapat menjadi dasar bagi berkembangnya sistem nilai baru yang lebih sesuai dengan lanskap bisnis yang kini telah banyak berubah.
5. Secara teoritis, praktik GCG dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Dari penjelasan tersebut, dapat dipastikan perusahaan yang memiliki *corporate governance* yang baik, tidak hanya akan memberikan keuntungan bagi perusahaan sendiri, melindungi kepentingan investor, tetapi juga pihak lain yang memiliki hubungan langsung maupun hubungan tidak langsung dengan perusahaan. Dengan *good corporate governance*, maka proses pengambilan keputusan akan dapat berlangsung dengan baik, sehingga akan menghasilkan keputusan yang optimal, dapat meningkatkan efisiensi serta terciptanya budaya kerja perusahaan yang lebih sehat. Dengan berbagai manfaat yang dapat dihasilkan oleh penerapan *corporate governance* yang baik, maka sudah sepantasnya para pelaku usaha di Indonesia menyadari begitu pentingnya konsep pemulihan usaha dan ekonomi secara nasional.

2.1.3.3 Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

Menurut Sri Sulistyanto (2008:2138-140), ada harapan yang ingin diraih dengan menerapkan keempat prinsip secara konsisten, yaitu terwujudnya kehidupan bisnis yang sehat, bersih, dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip tersebut yaitu:

1. Keadilan

Keadilan merupakan perlindungan terhadap hak seluruh pemegang saham termasuk pemegang saham minoritas (*minority shareholders*), untuk memperoleh informasi secara tepat waktu dan teratur, memberikan suara dalam rapat pemegang saham, memilih direksi dan komisaris, dan pembagian laba perusahaan. Selain itu keadilan juga menekankan pentingnya perlindungan pemegang saham dari berbagai penyimpangan orang dalam perusahaan, misalnya praktik *insider trading*, *self-dealing*, keputusan manajer

lain yang merugikan kepentingan seluruh pemegang saham, dan konflik kepentingan dalam menetapkan peran dan tanggung jawab dewan komisaris, manajer (direksi), dan komite, termasuk sistem remunerasi, menyajikan dan mengungkapkan informasi secara wajar.

2. Transparansi

Transparansi merupakan pengungkapan (*disclosure*) setiap kebijakan atau aturan yang (akan) diterapkan perusahaan, sebab kepercayaan investor dan efisiensi pasar sangat tergantung dari pengungkapan kinerja perusahaan secara adil, akurat, dan tepat waktu. Ada beberapa hal yang harus dilakukan perusahaan untuk mewujudkan prinsip ini.

- a. Mengembangkan sistem akuntansi yang berbasis standar akuntansi yang diterima secara umum dan *best practices* yang menjamin adanya laporan keuangan dan pengungkapan yang berkualitas.
- b. Mengembangkan teknologi informasi (*information system*) untuk menjamin adanya pengukuran kinerja yang memadai dan proses pengambilan keputusan yang efektif oleh komisaris dan manajer.
- c. Mengembangkan manajemen risiko korporasi (*enterprise risk management*) untuk memastikan bahwa semua risiko telah diidentifikasi, diukur, dan dapat dikelola pada tingkat yang jelas.
- d. Mengumumkan jabatan yang kosong, agar setiap pihak mengetahuinya. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi pengangkatan pejabat perusahaan dengan cara-cara yang kolusif atau nepotisme.

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas didasarkan pada sistem internal *checks and balances* yang mencakup praktik audit yang sehat dan dicapai melalui pengawasan yang efektif yang didasarkan pada keseimbangan kewenangan antara pemegang saham, komisaris, manajer, dan auditor. Ada beberapa hal yang harus dilakukan perusahaan untuk mewujudkan prinsip ini, yaitu:

- a. Perusahaan dituntut untuk menyiapkan laporan keuangan pada waktu dan cara yang tepat.
 - b. Perusahaan harus mengembangkan komite audit dan risiko untuk mendukung fungsi pengawasan yang dijalankan oleh dewan komisaris.
 - c. Perusahaan harus mengembangkan dan merumuskan kembali peran dan fungsi auditor internal sebagai mitra bisnis strategis berdasarkan *best practices*.
 - d. Perusahaan harus menjaga manajemen kontrak yang bertanggung jawab dan menangani pertentangan.
 - e. Perusahaan harus menggunakan jasa auditor eksternal yang profesional.
4. Responsibilitas

Responsibilitas merupakan tanggung jawab perusahaan untuk mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan mengenai lingkungan hidup, perlindungan konsumen, perpajakan, ketenagakerjaan, larangan monopoli dan praktik persaingan yang tidak sehat, kesehatan dan keselamatan kerja, dan peraturan lain yang mengatur kehidupan perusahaan dalam menjalankan aktivitas usahanya.

Sedangkan dalam hubungannya dengan tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Menteri Negara BUMN juga mengeluarkan Keputusan Nomor Kep-117/M-MBU/2002 dalam Sukrisno Agoes (2011:103-105), tentang penerapan GCG. Ada lima prinsip menurut keputusan ini, yaitu:

1. Kewajaran (*fairness*)
2. Transparansi (*transparancy*)
3. Akuntabilitas (*accountability*)
4. Pertanggungjawaban (*responsibility*)
5. Kemandirian (*independency*)

Penjelasan singkat atas masing-masing prinsip yang telah dikemukakan dapat diberikan sebagai berikut:

- 1) Prinsip kewajaran (*fairness*) merupakan prinsip agar para pengelola memperlakukan semua pemangku kepentingan secara adil dan setara, baik pemangku kepentingan primer (pemasok, pelanggan, karyawan, pemodal) maupun pemangku kepentingan sekunder (pemerintah, masyarakat, dan yang lainnya). Hal inilah yang memunculkan konsep *stakeholders* (seluruh kepentingan pemangku kepentingan), bukan hanya kepentingan *stockholders* (pemegang saham saja).
- 2) Prinsip transparansi (disebut juga prinsip keterbukaan), artinya kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. Keterbukaan dalam menyampaikan informasi juga mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Tidak

boleh ada hal-hal yang dirahasiakan, disembunyikan, ditutup-tutupi, atau ditunda-tunda pengungkapannya.

- 3) Prinsip akuntabilitas adalah prinsip dimana para pengelola berkewajiban untuk membina sistem akuntansi yang efektif untuk menghasilkan laporan keuangan (*financial statements*) yang dapat dipercaya. Untuk itu, diperlukan kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban setiap organ sehingga pengelolaan berjalan efektif.
- 4) Prinsip responsibilitas (lebih sering disebut prinsip tanggung jawab) adalah prinsip dimana para pengelola wajib memberikan pertanggungjawaban atas semua tindakan dalam mengelola perusahaan kepada para pemangku kepentingan sebagai wujud kepercayaan yang diberikan kepadanya. Prinsip tanggung jawab ada sebagai konsekuensi logis dari kepercayaan dan wewenang yang diberikan oleh para pemangku kepentingan kepada para pengelola perusahaan.
- 5) Prinsip Kemandirian sebagai tambahan prinsip dalam mengelola BUMN, artinya suatu keadaan dimana para pengelola dalam mengambil suatu keputusan bersifat profesional, mandiri, bebas dari konflik kepentingan, dan bebas dari tekanan atau pengaruh dari mana pun yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan yang sehat.

2.1.4 Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas laporan keuangan sebuah perusahaan tergantung dari seberapa besar informasi yang disajikan perusahaan bisa berguna bagi pengguna dan bagaimana perusahaan menyusun laporan keuangan yang ada berdasarkan kerangka konseptual dan prinsip-prinsip dasar dan tujuan akuntansi.

Baik buruknya kualitas perusahaan dapat dilihat dari sehat atau tidak sehatnya perusahaan tersebut. Perusahaan yang sehat akan memiliki laporan keuangan yang berkualitas baik tanpa adanya penyimpangan. Laporan keuangan merupakan salah satu alat ukur yang digunakan oleh para pemakai laporan keuangan dalam mengukur atau menentukan sejauhmana kualitas perusahaan.

Dari laporan keuangan tersebut, dapat diketahui keadaan finansial dan hasil-hasil yang telah dicapai perusahaan selama periode tertentu. Maka dari itu, untuk mendapatkan laporan keuangan yang berkualitas baik, perusahaan diharuskan menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam menjalankan aktivitas bisnisnya.

2.1.4.1 Pengertian Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan memiliki kemampuan untuk menyajikan secara gamblang kesehatan keuangan suatu perusahaan guna memberikan keputusan bisnis yang informative. Laporan keuangan sangat penting bagi manajemen perusahaan pada khususnya untuk pengambilan keputusan dan penyusunan perencanaan. Oleh karena itu, informasi akuntansi yang diperoleh harus memenuhi kriteria tertentu. Seperti yang dijelaskan oleh FASB dalam Zaki Baridwan (2010:4), sebagai berikut:

“Kriteria utama informasi akuntansi adalah harus berguna untuk pengambilan keputusan. Agar dapat berguna, informasi itu harus mempunyai dua sifat utama, yaitu relevan dan dapat dipercaya (*reliability*). Agar informasi itu relevan, ada tiga sifat yang harus dipenuhi yaitu mempunyai nilai prediksi, mempunyai nilai umpan balik (*feedback value*), dan tepat waktu. Informasi yang dapat dipercaya mempunyai tiga sifat yaitu dapat diperiksa, netral, dan menyajikan yang seharusnya. Disamping dua sifat utama, relevan dan dapat dipercaya, informasi akuntansi juga mempunyai dua sifat sekunder dan interaktif yaitu dapat dibandingkan dan konsisten”.

Suatu laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas atau tidak tergantung dari bagaimana cara pandang, karena kualitas laporan keuangan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, bisa dari kinerja maupun keakuratan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut.

2.1.4.2 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Laporan keuangan mengungkapkan informasi yang penting bagi berbagai pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Agar tujuan tersebut dapat dicapai, laporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif. Dengan karakteristik kualitatif tersebut, informasi kuantitatif dalam laporan keuangan dapat memenuhi kebutuhan pengguna.

Menurut kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 2012, karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pengguna. Karakteristik kualitatif tersebut sebagai berikut:

1. Dapat dipahami
2. Relevan
3. Materialitas
4. Keandalan
5. Penyajian jujur

6. Substansi mengungguli bentuk
7. Netralitas
8. Pertimbangan sehat
9. Kelengkapan
10. Dapat diperbandingkan

Uraian mengenai kutipan diatas sebagai berikut:

1. Dapat dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna. Untuk maksud ini, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pengguna tertentu.

2. Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam proses pengambilan keputusan. Informasi mempunyai kualitas relevan bila dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Peran informasi dalam peramalan dan penegasan berkaitan satu sama lain. Informasi posisi keuangan dan kinerja masa lalu sering kali digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja masa depan.

3. Materialitas

Relevansi informasi dipengaruhi oleh hakikat dan materialitasnya. Informasi dipandang material jika kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi khusus dari kelalaian dalam mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat.

4. Keandalan

Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (*reliable*). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan penggunaannya sebagai penyajian yang tulus atau jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

5. Penyajian jujur

Agar dapat diandalkan, informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Informasi keuangan pada umumnya tidak luput dari risiko penyajian yang dianggap kurang jujur dari apa yang seharusnya digambarkan. Hal tersebut bukan disebabkan karena kesengajaan untuk menyesatkan, tetapi lebih merupakan kesulitan yang melekat dalam mengidentifikasi transaksi serta peristiwa lainnya yang dilaporkan atau

dalam menyusun atau menerapkan ukuran dan teknik penyajian yang sesuai dengan makna transaksi dan peristiwa tersebut.

6. Substansi mengungguli bentuk

Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. Substansi transaksi atau peristiwa lain tidak selalu konsisten dengan apa yang tampak dari bentuk hukum.

7. Netralitas

Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pengguna, dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan yang berlawanan.

8. Pertimbangan sehat

Penyusun laporan keuangan ada kalanya menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian yang dihadapi dalam penyusunan laporan keuangan diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dan dengan menggunakan pertimbangan sehat (*prudence*) dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan perkiraan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aktiva atau penghasilan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban atau beban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat

tidak memperkenankan, misalnya pembentukan cadangan tersembunyi atau penyisihan (*provision*) berlebihan, dan sengaja menetapkan aktiva atau penghasilan yang lebih rendah atau pencatatan kewajiban atau beban yang lebih tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tak netral, dan karena itu, tidak mempunyai kualitas andal.

9. Kelengkapan

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan tidak sempurna ditinjau dari segi relevansi.

10. Dapat diperbandingkan

Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (*trend*) posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relative. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk entitas tersebut, antar periode entitas yang sama, dan untuk entitas yang berbeda.

2.1.4.3 Komponen-Komponen Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang lengkap menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 2012 No. 1 paragraf 11, terdiri dari komponen-komponen berikut ini:

1. Laporan posisi keuangan (neraca) pada akhir periode
2. Laporan laba rugi komprehensif selama periode
3. Laporan perubahan ekuitas selama periode
4. Laporan arus kas selama periode
5. Catatan atas laporan keuangan

2.2 Kerangka Pemikiran

Dengan semakin maraknya perusahaan-perusahaan besar yang ada didunia diharuskan untuk menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam kegiatan perusahaan. Menurut Sri Sulistyanto (2008:134), secara definitive *good corporate governance* diartikan sebagai sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan agar perusahaan itu menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*-nya. Untuk itu ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, yaitu hak pemegang saham yang harus dipenuhi perusahaan dan kewajiban yang harus dilakukan perusahaan. Semua pemegang saham mempunyai hak yang sama untuk memperoleh informasi yang sama (*fairness*) secara akurat dan tepat waktu. Tidak ada informasi yang disembunyikan dari pemegang saham tertentu untuk kepentingan pribadi pihak-pihak lain (*transparency*). Perusahaan mempunyai kewajiban untuk mengungkapkan sesuai informasi mengenai kinerja perusahaan secara akurat, tepat

waktu, dan transparan. Artinya, perusahaan mempunyai tanggung jawab untuk menginformasikan semua apa yang telah dilakukan dan dicapai perusahaan selama satu periode tertentu (*responsibility*). Apa yang diinformasikan perusahaan kepada publik harus dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keakuratannya, serta tidak ada sesuatu yang disembunyikan dari publik (*accountability*).

Pernyataan tersebut didukung penelitian Ony Widilestariningtyas dan Yesi Denti Utami (2008). *Good corporate governance* merupakan sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus perusahaan dan manfaat dari penerapan *good corporate governance* ini diharapkan adanya peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku. Hal tersebut dimaksudkan untuk memperkecil praktik-praktik kecurangan yang dapat menimbulkan krisis ekonomi bagi negara.

Beasley et al. (1996) dalam Sri Sulistyanto (2008:156), menyatakan: “Ada hubungan antara penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* dengan berkurangnya penyimpangan pada pelaporan keuangan dan meningkatkan kualitas laporan keuangan”.

Kualitas laporan keuangan sebuah perusahaan tergantung dari seberapa besar informasi yang disajikan perusahaan bisa berguna bagi pengguna dan bagaimana perusahaan menyusun laporan keuangan yang ada berdasarkan kerangka konseptual dan prinsip-prinsip dasar dan tujuan akuntansi.

Baik buruknya kualitas perusahaan dapat dilihat dari sehat atau tidak sehatnya perusahaan tersebut. Perusahaan yang sehat akan memiliki laporan keuangan yang berkualitas baik tanpa adanya penyimpangan. Laporan keuangan merupakan salah satu alat ukur yang digunakan oleh para pemakai laporan keuangan dalam mengukur atau menentukan sejauhmana kualitas perusahaan.

Dari laporan keuangan tersebut, dapat diketahui keadaan finansial dan hasil-hasil yang telah dicapai perusahaan selama periode tertentu. Maka dari itu, untuk mendapatkan laporan keuangan yang berkualitas baik, perusahaan diharuskan menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam menjalankan aktivitas bisnisnya.

Sri Sulistyanto (2008:156), juga mengemukakan upaya menerapkan prinsip *good corporate governance* membuat sebuah perusahaan akan mempunyai komite audit dan komisaris independen sebagai pihak yang melakukan pengawasan dan pengendalian untuk menciptakan keadilan, transparansi, akuntabilitas dan tanggung jawab. Keempat prinsip inilah yang membuat laporan keuangan sebuah perusahaan menjadi lebih berkualitas.

Dari pernyataan tersebut maka dapat dikatakan bahwa dengan diterapkannya *corporate governance* akan membuat kinerja suatu perusahaan lebih baik, karena adanya sistem pengawasan yang akan mengurangi penyimpangan sehingga akan membuat laporan keuangan berkualitas.

Selain itu, Dwi Martani, Sylvia Veronica, Ratna Wardhani, Aria Farahmita dan Edward Tnujaya (2012:14), menjelaskan bahwa laporan keuangan yang relevan dan andal dapat dihasilkan jika ada standar akuntansi, auditor yang berkualitas serta

praktik tata kelola yang baik diterapkan dalam entitas tersebut. Praktik tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) membuat manajemen memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam mengambil kebijakan akuntansi sehingga dihasilkan laporan keuangan yang relevan dan andal.

Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* dapat memberikan pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan suatu perusahaan. Karena dengan menerapkan prinsip GCG tentunya segala aktivitasnya atau kegiatan kegiatan yang dilakukan perusahaan akan bersifat transparan, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan bersifat setara. Hal tersebut akan berdampak pada laporan keuangan, laporan keuangan akan berkualitas karena berisi informasi yang material, relevan, tidak ada yang disembunyikan dan tidak memihak. Dengan laporan keuangan yang berkualitas pastinya investor akan tertarik untuk menginvestasikan dananya pada perusahaan.

Pernyataan tersebut didukung penelitian Rini Suryani (2013) bahwa untuk membuat laporan keuangan yang berkualitas, perlu dilaksanakannya tata kelola perusahaan atau *good corporate governance* dengan baik sehingga dapat terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam penyajian laporan keuangan. Selain itu, penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* agar dapat meningkatkan keberhasilan usaha dalam mencapai tujuan perusahaan yang dapat dilihat dari kualitas laporan keuangan perusahaan.

Didukung penelitian Hayyuning Tyas Rosdiani (2011) bahwa penerapan *good corporate governance* berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Good corporate governance memiliki tujuan untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, kegiatan-kegiatan usaha dilakukan secara transparan, sehingga perusahaan akan menyediakan informasi yang material, relevan dan tidak ada yang disembunyikan dengan menyajikan keuangan yang akurat dan tepat waktu. Penelitian tersebut didukung juga oleh penelitian Verawati (20120) yang berjudul prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* terhadap keandalan laporan keuangan hasil dari *quisioner* penelitian tersebut menunjukkan besarnya peranan prinsip *good corporate governance* dalam meningkatkan keandalan laporan keuangan perusahaan sebesar 87,27% atau dapat dikatakan berperan. Dengan demikian hipotesis yang diajukan penulis yang menyatakan bahwa peranan prinsip *good corporate governance* berpengaruh dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan.

Didukung penelitian oleh R. Ait Novatiani dan Jeanny Fatimmah (2013) diketahui bahwa penerapan *Good Corporate Governance* pada tiga perusahaan BUMN di bidang jasa yang berada di Bandung secara umum telah dilaksanakan secara memadai, hal ini dilihat dari nilai rata-rata yaitu 3,75 yang berada pada interval 3,40-4,20 yang artinya memadai. Hal tersebut didukung oleh adanya transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran. Keandalan Laporan Keuangan pada tiga perusahaan BUMN di bidang jasa yang berada di Bandung secara keseluruhan dapat dikatakan efektif karena memiliki nilai rata-rata 3,64 yang berada pada interval 3,40-4,20. Hal tersebut ditunjang oleh tercapainya penyajian jujur, substansi mengungguli bentuk, kelengkapan, netralitas dan pertimbangan sehat. Penerapan *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap keandalan laporan

keuangan yang dilihat dari nilai t hitung sebesar 2.247 lebih besar dengan t table sebesar 1.701, yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima.

Menurut penelitian oleh Theresia Adelia Simadibrata (2012) tentang “Peranan *Good Corporate Governance* Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan dan Kepercayaan Investor” diketahui bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan antara *good corporate governance* terhadap kualitas pelaporan keuangan dan kepercayaan investor. Pelaporan keuangan yang berkualitas dapat memberikan kepercayaan terhadap investor. Dengan adanya kepercayaan dari investor, maka investor akan menanamkan investasinya ke perusahaan. GCG memiliki prinsip-prinsip yang membantu perusahaan dalam menerapkan GCG dengan baik. GCG dapat meminimalkan risiko kesalahan penyajian informasi sehingga dapat menyajikan informasi yang berkualitas, maka investor dapat mempercayai informasi perusahaan yang telah disajikan. Tujuan pelaporan keuangan yang berkualitas adalah menyajikan informasi yang penting kepada pihak yang berkepentingan, salah satunya investor. Dengan mengetahui informasi yang benar dari pelaporan keuangan, maka investor dapat mengambil keputusan untuk melakukan investasi atau tidak. Pelaporan keuangan sangat mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh investor, sehingga perusahaan harus menyajikan pelaporan keuangan yang berkualitas agar investor memiliki kepercayaan untuk menanamkan investasinya. Kualitas pelaporan keuangan dapat dicapai jika perusahaan menerapkan prinsip-prinsip GCG. Dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam perusahaan, maka akan tercipta suatu pelaporan keuangan yang berkualitas dimana pelaporan keuangan yang berkualitas itu relevan dan *reliable*. Kualitas pelaporan keuangan yang ditunjang oleh GCG maka akan mencapai

tujuan pelaporan keuangan yaitu menyajikan informasi keuangan bagi pihak-pihak berkepentingan.

Menurut penelitian yang dilakukan Nesrine Klai dan Abdelwahed Omri (2011) bahwa penelitian ini mengevaluasi pengaruh mekanisme *governance* terhadap kualitas informasi keuangan untuk sampel Tunisia perusahaan non keuangan tercatat di Bursa Efek Tunis, selama periode 1997-2007. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan Tunisia dicirikan oleh kurangnya independensi dewan dan tingginya tingkat konsentrasi kepemilikan. Mekanisme tata kelola yang diwakili terutama oleh kekuatan asing, keluarga, blockholders, investor institusional dan Negara, mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan perusahaan Tunisia. Di satu sisi, kehadiran orang asing, keluarga dan pemegang saham utama diketahui bahwa mereka melakukan nepotisme di perusahaan Tunisia. Akibatnya, kekuatan mereka meningkatkan ketidakpastian informasi yang merupakan risiko informasi yang akhirnya dapat mempengaruhi biaya modal dari perusahaan (Easley dan O'Hara, 2004; Leuz dan Verrecchia, 2005). Hal ini menunjukkan bahwa kontrol oleh Negara dan lembaga keuangan merupakan mekanisme *governance* yang efektif untuk membatasi perilaku oportunistik manajer dan perusahaan Tunisia 'meningkatkan transparansi dan relevansi pelaporan keuangan. Secara keseluruhan, penelitian mendukung argumen bahwa tata kelola perusahaan mempengaruhi kualitas akuntansi dalam konteks bank di Tunisia.

Didukung penelitian Shehu Usman Hassan (2011) bahwa dewan direksi, komite audit dan kepemilikan institusional bertanggung jawab untuk pemantauan, evaluasi, dan mendisiplinkan manajemen bank. Mungkin salah satu tanggung jawab

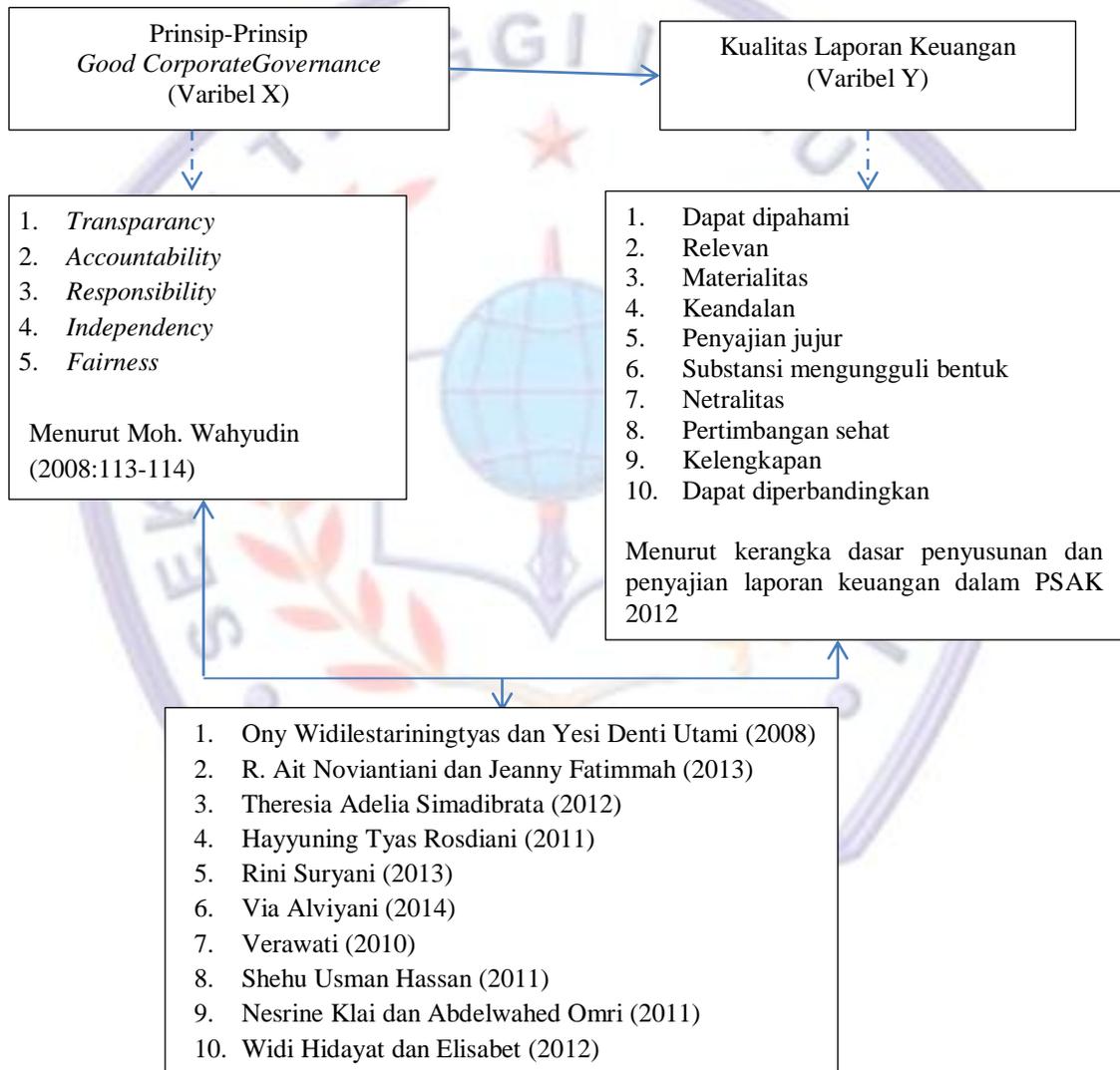
yang paling penting dari papan perspektif kreditur adalah pengawasan pelaporan keuangan. Karena kreditur mengandalkan akuntansi berbasis perjanjian dalam perjanjian pinjaman., kreditur mungkin memiliki kekhawatiran dengan monitoring dewan dan komite audit dari proses akuntansi keuangan, dan menyimpulkan bahwa *good corporate governance* memiliki pengaruh yang signifikan dalam mempengaruhi kualitas informasi keuangan di bank.

Didukung pula penelitian Via Alviyani (2014) bahwa prinsip-prinsip *good corporate governance* memiliki hubungan yang kuat sebesar 62,8% terhadap kualitas laporan keuangan jadi semakin baik penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* maka kualitas laporan keuangan akan meningkat dan sisanya sebesar 37,2% merupakan pengaruh faktor lain diluar penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* yaitu kinerja perusahaan, sistem pengendalian internal dan audit laporan keuangan.

Didukung pula penelitian yang dilakukan Widi Hidayat dan Elisabet (2012) bahwa variabel *corporate governance* sebagai variabel control secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan perusahaan. Pengujian seluruh *slope* koefisien secara bersama-sama menunjukkan hasil bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen walaupun tingkat variabilitas yang mampu dijelaskan relatif kecil. Pengujian seluruh *slope* koefisien secara simultan bernilai nol, pengujian ini ekuivalent dengan uji F pada *linear regression*, menggunakan *likelihood ratio* (LR) statistik ditunjukkan dengan nilai sebesar 14.757 dengan derajat bebas 9 yang berarti bahwa variabel *corporate governance* yang terdiri dari kepemilikan institusional, kepemilikan manajemen dan

komposisi dewan komisaris, independensi auditor, pertumbuhan perusahaan, umur perusahaan dan *leverage* perusahaan serta *operating cycle* dan *size* sebagai variabel kontrol secara bersama-sama berpengaruh signifikan pada tingkat 10% terhadap kualitas pelaporan keuangan perusahaan karena *p-valuenya* sebesar 0.098.

Secara lebih jelas, kerangka pemikiran yang telah diuraikan dapat dilihat gambar berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Menurut Uma Sekaran (2011:135), hipotesis bisa didefinisikan sebagai: “Hubungan yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji”. Hubungan tersebut diperkirakan berdasarkan jaringan asosiasi yang ditetapkan dalam rangka teoritis yang dirumuskan untuk studi penelitian”.

Berdasarkan uraian dalam kerangka pemikiran, maka dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

“Terdapat pengaruh penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* terhadap kualitas laporan keuangan”.

